



Membumikan Etika Sosial dan Pemahaman Multikultural Umat Beragama melalui Pendidikan Tinggi

Andit Triono

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, email: bgt.andit@gmail.com

Article Info	Abstract
<p><i>Submit: 2020-07-18</i> <i>Accepted: 2022-12-21</i> <i>Publish: 2022-12-31</i></p> <p>Keyword: Ethic, Multiculturalism, Harmony, High Education</p> <p>Kata Kunci: Etika, Multikulturalisme, Kerukunan, Pendidikan Tinggi</p>	<p><i>When we look at social interactions between communities, we cannot deny the presence of the influence of a religious framework as the basis of people's thinking and acting. Not in frequently the clash of communities under the pretext of religious understanding led to multidimensional conflict as the impact of "migrant labor" where everyone began to earn a living overseas that sometimes different in ethnicity, customs, race also religion. One obstacle that arises and becomes the source of conflict in plural societies is the low understanding of multiculturalism which impacts on the inflexibility and rigidity in thinking and acting. In the end it will reduce the social ethics that are actually the nature of God. This paper is a literature study that focuses on the fields of ethics and multiculturalism in the world of higher education that must be well aware of both the theory and its application. Therefore, this paper reviews critically about the concepts of ethical education and multiculturalism in students as future leaders in order to be able to apply in public spaces, social media, and families when they are or have been in the university.</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p><i>Ketika mencermati interaksi sosial antarmasyarakat, kita tidak bisa menafikan hadirnya pengaruh bingkai agama sebagai dasar berfikir dan bertindak masyarakat. Tidak jarang benturan antarmasyarakat dengan dalih perbedaan agama dan paham keagamaan memunculkan konflik multisegi sebagai imbas dari globalisasi dan "migrant labour" di mana setiap orang mulai mencari penghidupan di perantauan yang terkadang berbeda secara SARA dengannya. Salah satu kendala yang muncul serta menjadi biang konflik masyarakat majemuk ialah kerendahan pemahaman akan multikulturalisme yang berimbas pada ketidaklulusan dan ketidaklulusan dalam berfikir dan bertindak, yang pada akhirnya mereduksi etika-etika sosial yang sebenarnya fitrah dari Tuhan. Tulisan ini merupakan studi kepustakaan yang berfokus pada bidang etika dan multikulturalisme dalam dunia pendidikan tinggi yang harus disadari betul baik teori maupun aplikasinya. Oleh sebab itu, tulisan ini mengulas secara kritis tentang konsep pendidikan etika dan multikulturalisme pada para mahasiswa sebagai calon tokoh masa depan agar mampu berlaku secara baik di ruang publik, media sosial, serta keluarga ketika sedang atau telah berproses di perguruan tinggi.</i></p>

PENDAHULUAN

Semua orang di dunia ini pasti cenderung lebih sepakat terhadap cinta kedamaian dan kerjasama daripada konflik dan perselisihan (Wani dkk., 2015, hlm. 647). Namun kenyataannya sering sekali kita jumpai konflik dan perselisihan di sekeliling kita, di mana

pun itu bahkan di seluruh dunia. Contoh kasus terbaru adalah adanya gesekan antarumat beragama di India yang sangat mengucilkan harga nyawa manusia, yakni antara umat Islam dan Hindu (republika.co.id, 2020.). Gesekan yang terjadi mencederai kesepakatan nurani manusia sebagaimana di atas. Oleh sebab itu, agar keharmonisan tetap terjaga, maka salah satu upaya yang sangat humanis adalah dengan membumikan semangat saling memahami.

Sadar atau tidak, setelah mengikisnya budaya tribal serta migrasi pekerja dari satu titik ke titik lain membuahkan berbagai gesekan sosiologis. Hal tersebut menuntun manusia melakukan regresi serta reaktualisasi terhadap nilai-nilai naluriannya tentang kemanusiaan yang telah Tuhan berikan. Implikasi logisnya adalah harmonisasi dalam setiap lini kehidupan manusia. Hal ini telah terumuskan dalam ideologi negara, yakni Pancasila (Mukhlis, 2016, hlm. 171). Salah satu pendongkrak keharmonisan hidup sesuai dengan ideologi ini adalah adanya intervensi agama. Sebab agama memiliki fungsi paling sakral dalam pembentukan pribadi masyarakat Indonesia sebagaimana pada sila pertama Pancasila. Sila pertama ini memberikan sinyal akan kehadiran Tuhan sebagai suatu hal yang mutlak dalam bermasyarakat yang digali dari Agama.

Agama-agama yang ada di Indonesia memiliki dua dimensi pembentuk, yakni ajaran teologis dan juga konstruksi sosial (Ghufron, 2016, hlm. 19). Kedua dimensi ini yang kemudian mempengaruhi dan membentuk cara pandang serta berfikir masyarakat. Maka tidak heran ketika satu orang dengan orang lain berbeda dalam banyak hal terkait ritus atau pemahaman keagamaan yang terkadang membawa kepada konflik perpecahan.

Perbedaan yang kian beragam dewasa ini menjadi hal yang sensitif dan cenderung anti untuk diterima keberadaannya, apalagi terkait agama. Hal tersebut nyata merenggut keharmonisan sosial yang seharusnya mampu terbentuk sebagai akibat dari mencuatnya perbedaan. Banyak sekali kasus yang mendera publik kita terkait hal ini, misalnya konflik SARA di Ambon dan Poso yang dinilai banyak orang sebagai konflik keagamaan, yakni antara Islam dan Kristen (Ali Ahmad, 2013, hlm. 1). Ada juga di Bogor, yakni terkait pendirian Gereja Kristen Indonesia Yasmin yang secara hukum memiliki legalitas tetapi dirampas hak para jamaahnya untuk melaksanakan peribadatan di sana dengan munculnya isu Kristenisasi, meskipun ada juga unsur politik-ekonomi yang mendukung pencabutan izin dan pelarangan ini (Noor, 2015, hlm. 18–19).

Bahkan belum lama ini, konflik yang menjurus pada intoleransi juga terjadi di Minahasa. Konflik tersebut mencuat dari adanya perusakan mushola (suara.com,2020.) yang secara “bar-bar” dilakukan oleh sekelompok orang misterius yang merasa terganggu dengan kehadirannya (Liputan6.com, 2020). Hal-hal yang penulis contohkan tersebut merupakan buah dari adanya egosentisme baik etnik maupun agama yang menimbulkan prasangka buruk dan stereotip terhadap yang berbeda. Hal ini merupakan akibat eksklusifitas dan inspirasi superioritas yang akan dengan mudah meruntuhkan teras-teras keharmonisan bangsa.

Dalam membangun harmonisasi hidup manusia yang majemuk, maka para pemerhati kerukunan keagamaan banyak yang telah memformulasikan konsep teoritis maupun praktisnya. Begitu pun tulisan ini, secara khusus akan membahas secara lebih dalam mengenai konsep membumikan etika sosial umat beragama untuk kehidupan masyarakat multikultural yang harmoni. Konseptualisasi yang penulis sajikan dalam tulisan ini semoga dapat memberikan alternatif pemikiran untuk fase implementasinya.

METODE

Tulisan ini merupakan hasil dari jenis studi kepustakaan, yakni penelitian yang sumber datanya diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus tulisan. Adapun yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah etika sosial dan pemahaman multikultural umat beragama yang ada dalam proses belajar mahasiswa di perguruan tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara konseptual bagaimana membumikan etika sosial dan pemahaman multikultural umat beragama di perguruan tinggi agar terjadi harmonitas kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Multikulturalisme serta Penerapan Etika Sosial di Ruang Publik: Sebagai Jembatan Keharmonisan

Multikulturalisme ialah konsep pengelolaan masyarakat yang plural dengan memberikan pengakuan baik kultural maupun politis terhadap kemajemukan budaya masyarakat, sekecil apa pun kemajemukannya (Noor, 2015, hlm. 17). Konsep ini terkadang disepadankan dengan pluralisme, namun tentu saja berbeda. Pluralisme hanya sebatas pemahaman sadar yang tulus dan kritis akan keragaman (Saripudin, 2012, hlm. 13), sedangkan multikulturalisme adalah pengelolaan dari keragaman itu sendiri. Dalam perkembangannya, konsep multikulturalisme agaknya lebih dapat diterima oleh publik daripada konsep pluralisme. Konsep pluralism yang diinternalisasikan bersamaan dengan pemahaman teologis maka akan menjadi utopis bagi penerapannya. Sementara multikulturalisme tidak terlalu menimbulkan polemik.

Namun, konsep multikulturalisme sendiri juga tidak lepas dari polemik yang secara kencang menggoncang publik, yakni dalam ranah penerimaan atas kemajemukannya. Hal ini dikarenakan oleh efek negatif dari eksistensi kemajemukan itu sendiri. Kita semua paham bahwa identitas manusia terbentuk dari berbagai kemajemukan, baik budaya, sejarah, agama, keadaan geografis dan memori kolektif dari masyarakat yang mengristal menjadi nilai. Identitas kolektif yang menjadi komunitas akan menciptakan konsep kita dan mereka (Cook, 2019, hlm. 326–327).

Pribadi yang terbentuk dari proses interaksi dalam sebuah komunitas sosial kadang kala akan membawa individu kepada paham etnosentrisme. Paham ini yang kemudian membawa sikap eksklusifitas pada setiap individu. Sehingga virus-virus perpecahan dan konflik mencuat satu persatu. Masalah yang muncul bukan saja masalah individual, tapi merambah pada masalah komunal. Masalah-masalah tersebut akan bertambah parah apabila berkaitan dengan etnosentrisme agama. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Chris Wilson sebagai kekerasan komunal (Wilson, 2008, hlm. 1–2).

Salah satu konflik besar yang pernah terjadi adalah sebagaimana yang telah terjadi di Kao, Maluku Utara, Indonesia (1999-2000). Konflik ini meletus sebagai imbas pertengkaran pribadi yang menjalar menjadi masalah keagamaan antara suku Kao dan Makian yang merepresentasikan perbedaan agama yakni Kristen (indigenous society) dan Islam (migrant society). Inilah realitas plural yang gagal ditangani dari pandangan pluralisme yang bias dalam payung agama, sehingga kemudian konsep multikulturalisme menjadi wajah yang lebih ramah dalam menanggulangi berbagai konflik dari realitas plural masyarakat (Masykur, 2017).

Meskipun demikian, multikulturalisme juga berkait erat dengan kepentingan-kepentingan yang bermain dalam ruang publik. Dua kepentingan yang paling berpengaruh adalah kepentingan politik dan ekonomi. Keduanya kerap kali menjadikan agama sebagai salah satu alat untuk mencapainya. Namun penting diingat, bahwa

idealnya ruang publik seminimal mungkin terbebas dari berbagai kepentingan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Jika egoism kepentingan segelintir ini dilunturkan, maka akan sangat mungkin untuk tercapainya “kebahagiaan” sosial dalam masyarakat (Noor, 2015, hlm. 18).

Ruang publik sebagaimana dinyatakan oleh Purwanto adalah ruang di mana interaksi antar manusia—dalam lingkup lebih besar yaitu komunitas—terjadi yang harusnya mampu menjadi nilai tambah bagi manusia. Ruang publik juga merupakan ruang yang diindikasikan sebagai ruang universal yang disediakan untuk berbagai masyarakat dalam kelas-kelas yang berbeda. Tentu saja dalam ruang ini harus ada kepublikan yakni terjadinya pergaulan sosial antarmanusia yang kolektif (Purwanto, 2014, hlm. 154). Sehingga sangat bijak untuk memertegas bahwa publik seharusnya terbebas dari berbagai kepentingan segelintir orang. Meskipun pada dasarnya ruang publik juga menjamin tercapainya tujuan sebagai sebuah kepentingan dari manusia. Kepentingan yang diidamkan adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan segelintir orang yang memunculkan kerugian bagi orang lain dalam ruang publik tersebut.

Pada tataran realitas masyarakat yang multikultur di Indonesia, berbagai gesekan di ruang publik terjadi sebagai akibat permainan kepentingan-kepentingan di dalamnya. Secara garis besar akan memunculkan dua paham, superior dan inferior. Kedua paham tersebut jika dipelihara terus menerus pada akhirnya akan mampu menyulut konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, salah satu hal penting yang perlu dipahami oleh manusia adalah hadirnya etika sosial (Arifin dkk., 2017). Etika sosial diterapkan sebagai sebuah jembatan penghubung antarmasyarakat agar menjadi komunitas yang harmoni. Dengan jembatan ini, konsep mereka “otherness” dan kita “us” akan lebur atas nama kemanusiaan. Begitu juga, meskipun manusia sangat kental bergumul dalam payung keagamaan, apabila etika sosial diterapkan maka tidak akan ada diskriminasi. Hal ini disebabkan oleh kemakluman masyarakat yang akan memandang setiap manusia sebagai manusia yang haknya sama seperti mereka.

Etika sosial dalam ruang publik ini di antaranya harus diaplikasikan dalam beberapa ranah yang berkaitan dengan proses membentuk individu. Pertama ialah penguatan kecerdasan sosial individu melalui kesadaran diri atas kondisi plural. Kedua ialah melalui pendidikan entah itu dalam ranah formal maupun keagamaan yang terbuka akan pluralitas. Ketiga ialah hadirnya jurnalisme yang menjunjung pentingnya persatuan dalam suatu kebhinekaan (Noor, 2015, hlm. 20–22). Dengan demikian, eksistensi negara sebagai payung bagi masyarakat yang ragam akan tetap wujud dalam membina masyarakatnya. Sehingga kesatu paduan masyarakat akan membentuk semangat dalam mencapai tujuan bersama sebuah negara. Apalagi di era globalisasi ini.

Dalam kaitan globalisasi dan etika sosial sebagaimana dijelaskan di atas, individu yang beretika dapat dibentuk melalui proses pendidikan (termasuk agama) dan melalui bacaan atau informasi yang dikonsumsi. Sehingga tidak heran, titik tekan yang harus diperhatikan adalah kehadiran agama dan media dalam ranah publik (as a controlling power). Bagaimana pun juga, pada masyarakat modern, agama memainkan peran yang sustainable (Maulidia, 2018, hlm. 65) dan begitu pun media. Sebab pada dasarnya setiap manusia akan cenderung mengindahkan moral-moral yang diajarkan melalui pemahaman keagamaan, serta akan mudah terpengaruh oleh informasi yang ia dapatkan.

Sebagaimana fenomena interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia di ruang publik dewasa ini, maka hadir pula ruang publik baru. Ruang baru ini merupakan ruang publik yang sangat riskan menghadirkan berbagai penyelewengan sosial, terutama masalah etika dan tanggung jawab dari individu. Jika dahulu interaksi terjadi hanya dalam

ruang nyata, saat ini terjadi juga dalam ruang maya. Ruang publik yang baru ini merupakan produk dari modernitas yakni kemajuan ilmu pengetahuan yang menghasilkan teknologi (Nasution, 2019).

Kehadiran berbagai teknologi di era sekarang ini memungkinkan manusia untuk lebih mudah dalam berkomunikasi sekaligus mengakses berbagai informasi (Fahrimal, 2018) Sehingga tidak heran, munculnya berita kebohongan dan juga kejahatan dunia maya—sebagai akibat sinergisitas akal, mata, jemari serta mulut yang destruktif—sangat berkontribusi terhadap adanya konflik baru yang perlu disikapi dengan etika dalam bersosial (Candraningrum dkk., 2019) Hadirnya etika yang baik akan menghadirkan tata komunikasi yang baik pula. Yakni tata komunikasi yang disertai niat, ketulusan dan empati yang akan menghembuskan kehangatan interaksi manusia. Salah satu yang bisa dipergunakan adalah ajaran sosial dalam agama (Apriawan & Ningsih, 2019).

Kehadiran agama dengan konsep moralnya memberikan tuntunan yang menjadi inspirasi pemeluknya untuk beretika di ruang publik. Media dengan ragam informasinya membenturkan berbagai pandangan dan membentuk pandangan baru dalam diri manusia. Dengan demikian, keselarasan antara agama dan media (dengan berbagai instrumennya) dibutuhkan untuk membumikan etika demi keharmonisan masyarakat majemuk dalam ruang publik. Penting diingat, bahwa peran negara juga begitu fundamental dalam menyediakan dan mengampanyekan etika di ruang publik. Tentu saja akan terwujud apabila terdapat kerjasama antarunsur di dalam masyarakat. Dengan demikian relasi antarpemeluk agama-agama, budaya yang berbeda, ras dan suku akan menjadi harmonis.

Pendidikan Multikultural dan Etika di Perguruan Tinggi: Bekal bagi Transformasi Sosial

Dalam sub bahasan ini, penulis secara khusus membahas tentang konsep pendidikan multikultural dan etika yang ada di perguruan tinggi. Konsep pendidikan multikultural akan membawa pada kesadaran untuk berfikir secara adil dalam melihat orang lain (Apriawan & Ningsih, 2019, hlm. 143). Sementara pendidikan etika yang menginternalisasikan nilai luhur yang mencakupi ranah pribadi dan sosial akan sangat membantu manusia. Etika yang baik akan memudahkannya dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan sekaligus makhluk sosial (Mahfud, 2018). Konsep pendidikan yang mengusung dua domain besar di atas dalam kerangka pendidikan tinggi akan membentuk pribadi-pribadi yang mampu menransformasikan masyarakat menuju perubahan yang lebih baik.

1) Mahasiswa Calon Pemimpin dalam Transformasi Sosial

Transformasi sosial pada dasarnya merupakan konsep tentang proses perubahan pada struktur sosial. Konsep ini mengandung makna proses perubahan nilai yang dianuti masyarakat. Nilai yang berubah menghasilkan perubahan secara besar terhadap pola pikir dan pola tindak masyarakat (Apriawan & Ningsih, 2019, hlm. 134). Tugas transformasi ini sangat mungkin atau bisa jadi wajib untuk diemban oleh setiap orang, akan tetapi mahasiswa menjadi salah satu yang perlu diperhitungkan. Hal ini dilandasi dari kesadaran penulis bahwa generasi yang sedang berproses di perguruan tinggi merupakan generasi terdidik yang siap menjadi agen transformasi sosial (Indirawati, 2006).

Ranah pendidikan tinggi ini diambil dengan melandaskan diri pada pengaruh mereka setelah berkarir di masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat kita masih menganggap orang yang berpendidikan tinggi sebagai cahaya yang mampu membantu mereka dalam berjalan di jalan yang awalnya gelap. Artinya

mahasiswa merupakan sosok yang dapat diterima di semua lapisan masyarakat kita (Anwar dkk., 2019). Sehingga circle effect yang akan timbul adalah manfaat yang berkesinambungan, khususnya dalam proses diseminasi paham kedamaian. Tentunya harmonisasi kehidupan masyarakat menjadi tujuan yang sangat diharapkan.

Mahasiswa yang telah menamatkan pendidikannya tentu akan kembali kepada masyarakat dan menempati posisi-posisi tertentu. Ada yang mungkin menjadi kepala sekolah, ada yang bekerja dalam birokrasi pemerintahan, atau pun menjadi tokoh dalam masyarakatnya. Jika tidak menduduki jabatan pun, ia akan menjadi partner dalam sebuah keluarga. Intinya, mereka akan memiliki kekuasaan yang berkorelasi dengan pengetahuannya. Dengan kekuasaan ini ia akan mampu membuat regulasi, menentukan strategi serta memberikan sumbangsih terhadap maju atau tidaknya masyarakat (Syahputra, 2017). Kuasa sebagai imbas dari pengetahuan yang dimiliki para intelektual ini akan berpengaruh besar terhadap proses transformasi sosial masyarakatnya baik dalam proses interaksi sosial di dunia nyata maupun maya. Pemimpin-pemimpin yang berbekal pengetahuan ini idealnya akan berupaya dalam proses optimalisasi berbagai potensi kemajemukan menuju arah keharmonisan dan kemajuan masyarakat (Fahmi, 2018).

Untuk mewujudkan hal ini, tentu saja mahasiswa yang mengarungi kehidupan akademik di kampus harus mendapatkan pembelajaran yang berbasis pemahaman multikulturalisme. Pemahaman multikultural ini akan memberikan frame of reference dalam menyikapi perbedaan. Begitu juga mahasiswa sebagai calon pemimpin di masyarakat harus memiliki pemahaman yang mumpuni tentang konsep etika yang dapat dipergunakan dalam interaksi sosial dan ditularkan kepada masyarakatnya.

2) Pendidikan Multikultural di Perguruan Tinggi

Salah satu konsep yang banyak orang tawarkan adalah konsep pendidikan agama-agama. Konsep ini melampaui konsep pendidikan berwawasan multikultural yang ada, sebab dalam konsep ini agama diajarkan dalam bingkai kebebasan. Konsep ini merupakan konsep aplikatif yang pernah juga dilakukan oleh Hairus Salim HS, yakni ketika mengajarkan agama-agama dengan pemuka agama yang lainnya dalam sebuah (ruang) kampus (Noor, 2015, hlm. 34). Secara nyata, konsep ini masih butuh pendalaman dan perincian teknis bagi penerapannya. Terlebih lagi adanya sikap absolutism agama-agama yang memungkinkan akan memantik polemik, khususnya pada klaim kebenaran (Abdullah, 1993). Maka dari itu pendidikan berwawasan multikultural menjadi sebuah konsep yang sepatutnya diperjuangkan. Pendidikan berwawasan multikultural adalah konsep pendidikan yang inklusif yang didesain untuk membantu para peserta didik yang berbeda baik asal kelompok, agama dan sejenisnya dalam memahami kesetaraan sebagai manusia (Banks, 2006, hlm. 182).

Pendidikan agama-agama akan menghadirkan kemungkinan konversi, sebagai akibat pengalaman keagamaan individu (Ridwan, 2017, hlm. 12). Meskipun, dalam ideologi bangsa, kebebasan beragama juga sangat dijamin negara. Sebagaimana dalam pasal 29 UUD 1945, yakni “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” yang artinya bahwa kepercayaan bangsa Indonesia adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Rachman, 2011, hm. xiv). Maka dari itu, konversi agama selayaknya harus dipandang secara bijak bukan dengan

penghakiman yang seringkali pejoratif (Sumbulah, 2014, hlm. 372). Namun harus dipahami pula bahwa kecenderungan masyarakat beragama di Indonesia memang seperti itu—secara umum masyarakat merasa takut atau menyangkan—terhadap konversi agama.

Maka dari itu penulis rasa hal yang lebih arif adalah dengan diadakannya proses dialog antar agama untuk menyemai keharmonisan masyarakat plural. Sebagaimana dikatakan oleh Tariq Ramadan bahwa yang harus dilakukan adalah interreligious dialogue dan bukan cara lama, yakni dengan mencoba agama-agama (Ramadan, 2004, hlm. 200). Dialog merupakan cara untuk merukunkan, dalam bahasa Mukti Ali “agree ini disagreement” (Ali Ahmad, 2013, hlm.xvi). Dialog ini dapat direalisasikan melalui kebijakan yang ada dalam lembaga yang mengusung nuansa multikulturalisme (Vervaeet dkk., 2018, hlm. 75). Bukan hanya itu, harus dilakukan aksi nyata, yakni mulai dari kurikulum yang mengikat dari negara, kebijakan lembaga, kepemimpinan dan guru yang berfaham multikultural, sehingga benih kedamaian akan muncul dalam diri mahasiswanya (Wani dkk., 2015, hlm. 650).

3) Pendidikan Etika di Perguruan Tinggi

Selain adanya pendidikan berbasis multikulturalisme pendidikan etika juga penting. Sebab etika pada dasarnya melampaui gambaran yang telah digariskan agama-agama, ia membicarakan tentang masalah kehidupan sebagai argumentasi rasional yang apabila diterapkan akan menimbulkan akibat pada aspek sosial, budaya dan politik yang luas. Ia lebih dari konsep moral yang ada dalam agama yang selalu berkaitan dengan dosa dan pahala, hukuman dan ganjaran (Noor, 2015, hlm. 35–36).

Selain memiliki kelebihan, etika juga memiliki kekurangan jika dibanding dengan konsep moral. Etika merupakan cara berfikir kritis tetapi tidak memiliki wewenang untuk menentukan apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak. Wewenang ini secara tegas dimiliki oleh moral, entah itu moral agama, sosial, adat ataupun yang lainnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sebagaimana dalam tulisan ini, etika dipahami sebagai filsafat atau pemikiran kritis yang mendasar tentang mengapa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu yang terkandung dalam moral (Magnis-Suseno, 1987, hlm. 14).

Dengan demikian, etika dapat kita gunakan untuk meninjau ulang secara kritis norma-norma moral yang ada di sekeliling kita itu. Termasuk gaya politisasi atas agama-agama yang menimbulkan konflik, biasanya simbol-simbol agama yang digunakan sebagai pemantikknya. Simbol keagamaan ini bisa digunakan untuk memobilisasi masa, membuat sikap-sikap dan tindakan perlawanan terhadap yang dianggap rival atau musuh dari komunitasnya (Smith, 1970, hlm. 145–146; Sumbulah, 2006, hlm. 1–2). Etika dapat digunakan untuk menakar ulang hal tersebut.

Etika yang diterapkan bekerja ebagaimana dalam prinsip teori pertukaran sosial, yakni untuk mencapai kesimpulan tentang hakikat manusia. Ketika manusia mampu berbuat baik kepada orang lain ia akan memperoleh hadiah berupa kesenangan dari emosinya sebagai faedah atau keuntungan. Selain itu, hadiah ini juga mengandung kekuatan pengesahan sosial (social approval) sebagai buah dari upaya yang dilakukan untuk menyenangkan orang lain. Hal seperti ini yang secara naluri dicari oleh manusia (Wirawan, 2014, hlm. 175–176). Sehingga atas dasar etika, manusia akan hidup berdampingan dengan damai meskipun dalam bingkai

kemajemukan (budaya, suku, ras, agama dan kelas sosial). Menurut hemat penulis, mahasiswa sangat mampu memainkan peran ini sebagai agen pengusung (da'i) etika di masyarakatnya.

Unsur terkecil masyarakat adalah keluarga, keluarga berdampingan dengan keluarga lain sehingga membentk interaksi ketetangga. Tetangga yang hidup berdampingan harus memerhatikan aspek kerukunan yang berimplikasi kepada ketentraman dan kenyamanan hidup bersama (Noor, 2015, hlm. 52). Hal ini karena dalam bertetangga adalah berdampingan dengan perbedaan, dalam konteks Indonesia bisa berupa suku, ras bahkan agama. Dalam menghadapi hal ini maka perlu ditekankan kembali tentang etika, utamanya adalah etika dalam bertetangga.

Etika dalam bertetangga mencakup beberapa hal, pertama ialah berlaku saling menjaga hak milik tetangga, kedua saling tolong menolong, dan ketiga berlaku saling hormat menghormati (Noor, 2015, hlm. 61–63). Ketiga hal ini berlaku kepada segala rupa tetangga, artinya tidak memandang atas perbedaan yang ada, baik itu suku, agama, ras bahkan budaya. Apabila setiap keluarga mampu menerapkan etika sosial tersebut, maka sudah barang tentu keharmonisan, kedamaian, ketentraman dan kehidupan dalam bermasyarakat akan terjamin.

KESIMPULAN

Hadirnya harmonitas sebagai hal yang selalu diidamkan oleh setiap orang perlu dilakukan melalui dan oleh unsur-unsur sosial masyarakat, baik individu, maupun lingkungan masyarakat baik dalam dunia nyata maupun maya. Peradaban manusia yang bergerak maju merubah tatanan hidup dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi dalam kondisi dunia saat ini, yang semakin menunjukkan dan memperjelas realitas kemajemukan manusia dengan berbagai keruwetannya. Demi mewujudkan harmonitas tersebut maka manusia perlu memahami tentang multikulturalisme dan etika sosial.

Individu dengan pemahaman multikultural sekaligus beretika dapat dilakukan melalui diseminasi dalam proses pendidikan. Sebagaimana dalam kehidupan sosial, masyarakat perlu orang-orang terdidik yang siap memimpin laju transformasi menuju peradaban yang terbaik. Salah satu individu yang menjadi aktor pentingnya adalah mahasiswa. Siklus mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi, kemudian kembali ke masyarakatnya, lalu membentuk keluarga bahkan menjadi pemimpin dalam masyarakatnya harus disiapkan dengan baik. Mahasiswa harus dibekali wawasan tentang multiulturalisme dengan membiasakan berdialog, sekaligus ditanamkan pemahaman etika sebagai metode dalam berfikir dan bertindak. Dengan demikian, ia akan mampu menjadi pemimpin dalam transfomasi sosial masyarakat melalui keluarga serta masyarakat secara luas. Orientasi dari semua ini adalah terciptanya harmonitas dalam hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (1993). Keimanan Universal ditengah Pluralisme Budaya, tentang Klaim Kebenaran Agama, dan Masa Depan Agama. *Ulumul Qur'an*, IV(1), 88–96.
- Ali Ahmad, H. (Ed.). (2013). *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Anwar, S., Kudadiri, S., & Wijaya, C. (2019). *Peran Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam*

- Aceh Tenggara sebagai Agents of Social Change. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(2), 179–187. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i2.11950>
- Apriawan, A., & Ningsih, D. P. (2019). Urgensi Pendidikan Demokrasi dan Multikultural Bagi Masyarakat Plural. *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(5), 133–139. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/846>
- Arifin, M. H., Harta, R., & Setiani, M. Y. (2017). Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis. Universitas Terbuka. <http://repository.ut.ac.id/7130/>
- Banks, J. A. (2006). *Race, Culture, and Education: The Selected Works of James A. Banks*. Routledge.
- Candraningrum, D. A., Widayatmoko, W., & Utami, B. (2019). Etika dan Budaya Berinteraksi di Media Sosial di Sma Warga Surakarta. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i1.1871>
- Cook, J. W. (2019). *Sustainability, Human Well-Being & The Future of Education*. Palgrave Macmillan.
- Fahmi, T. (2018). Kepemimpinan dan Multikulturalisme di Indonesia, Book Section of ANak Muda dan Masa Depan Indonesia, ISBN: 978-602-441-050-6. Dalam *Anak Muda & Masa Depan Indonesia: Bunga Rampai Pemikiran Anak Muda dari Aceh sampai Papua era Jokowi* (hlm. 96–100). PT Mizan Pustaka. <http://www.mizan.com/>
- Fahrimal, Y. (2018). Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 22(1), 69–78. <http://jurnal-p2kp.id/index.php/jp2kp/article/view/82>
- Ghufron, F. (2016). *Ekspresi Keberagaman di Era Milenium*. IRCiSoD.
- Indirawati, E. (2006). Hubungan Antara Kematangan Beragama dengan Kecenderungan Strategi Coping. *Jurnal Psikologi*, 3(2), 69–92. <https://doi.org/10.14710/jpu.3.2.69-92>
- Liputan6.com. (2020, Januari 30). Orang Misterius Picu Perusakan Musala di Minahasa Utara. [liputan6.com. https://www.liputan6.com/regional/read/4167741/orang-misterius-picu-perusakan-musala-di-minahasa-utara](https://www.liputan6.com/regional/read/4167741/orang-misterius-picu-perusakan-musala-di-minahasa-utara)
- Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius.
- Mahfud, M. (2018). Membumikan Konsep Etika Islam Abdurrahman Wahid dalam Mengatasi Problematika Kelompok Minoritas di Indonesia. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 6(1), 42–60. <http://www.jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/129>
- Masykur, S. (2017). Pluralisme dalam Konteks Studi Agama-Agama. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 8(1), 61–77. <https://doi.org/10.24014/trs.v8i1.2471>

- Maulidia, H. (2018). Agama di Ruang Publik: Kajian Kritis terhadap Pemikiran Furshet, Casanova, dan Sherkat. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 12(1), 55–69. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/11696>
- Mukhlis, F. H. (2016). Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama. *Fikrah*, 4(2), 171–186. <https://www.neliti.comNone>
- Nasution, L. K. (2019). Peran Media Sosial Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama. *Hikmah*, 13(2), 221–240. <https://doi.org/10.24952/hik.v13i2.1949>
- Noor, N. M. (2015). *Manual Etika Lintas Agama untuk Indonesia*. Globalethics.net.
- Purwanto, E. (2014). Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business District (Belajar dari kasus Kawasan Simpang Lima Semarang). *TATALOKA*, 16(3), 153–167. <https://doi.org/10.14710/tataloka.16.3.153-167>
- Rachman, B. M. (2011). *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme (Buku 1)*. Democracy Project.
- Ramadan, T. (2004). *Weaern Muslims and The Future of Islam*. Oxford University Press.
- republika.co.id. (2020). Kedamaian Warga Muslim dan Hindu Terkoyak di India | *Republika Online*. Diambil 28 Februari 2020, dari <https://www.republika.co.id/berita/q6e3le382/kedamaian-warga-muslim-dan-hindu-terkoyak-di-india>
- Ridwan, S. (2017). Konversi Agama dan Faktor Ketertarikan Terhadap Islam (Studi Kasus Muallaf Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah Dr. Zakir Naik di Makassar). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.24252/.v11i1.3543>
- Saripudin, A. (2012). *Dakwah Antarbudaya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Smith, D. E. (1970). *Religion and Political Development*. Little, Brown and Company.
- suara.com. (2020.). Heboh Perusakan Musala di Minahasa Utara, MUI Angkat Bicara. Diambil 28 Februari 2020, dari <https://www.suara.com/news/2020/01/31/090420/heboh-perusakan-musala-di-minahasa-utara-mui-angkat-bicara>
- Sumbulah, U. (2006). Agama, Kekerasan dan Perlawanan Ideologis. *Islamica*, 1(1), 1–11. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/4>
- Sumbulah, U. (2014). Kebebasan Beragama di Smu Selamat Pagi Indonesia Kota Batu Malang. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14(2), 359–380. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i2.82>
- Syahputra, I. (2017). Post Media Literacy: Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault. *Jurnal ASPIKOM*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i1.4>
- Vervaet, R., Van Houtte, M., & Stevens, P. A. J. (2018). Multicultural school leadership, multicultural teacher culture and the ethnic prejudice of Flemish pupils. *Teaching and Teacher Education*, 76, 68–77. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.08.009>
- Wani, H., Abdullah, R., & Chang, L. W. (2015). *An Islamic Perspective in Managing*

Religious Diversity. *Religions*, 6(2), 642–656. <https://doi.org/10.3390/rel6020642>

Wilson, C. (2008). *Ethno-Religious Violence in Indonesia*. Routledge.

Wirawan, I. B. (2014). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial) (Cet.3)*. Kencana.